

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Dari analisis keuangan yang telah dibuat maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas pendapatan daerah tahun 2016 sebesar 96,05%, tahun 2017 sebesar 94,39% dan tahun 2018 sebesar 96,38%. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pendapatan dari tahun 2016 sampai 2018 sebesar 95,60% yang berarti efektivitas pengelolaan keuangan khusus pendapatan daerah Kabupaten Kupang tergolong efektif tetapi kurang efisien. Namun demikian dilihat dari rata-rata pendapatan asli daerah hanya mencapai 78,57% yang artinya selama tahun 2016-2018 efektivitas PAD tergolong kurang efektif. Pencapaian efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan daerah pada awalnya baik/efektif. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 94,39%.
2. Efektivitas belanja Daerah Kabupaten Kupang tahun 2016 sebesar 89,79%, tahun 2017 sebesar 93,25%, dan tahun 2018 sebesar 93,49%. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas belanja dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 92,17% yang berarti efektivitas belanja daerah Kabupaten Kupang tergolong efektif tetapi kurang efisien. Pemerintah daerah kabupaten kupang masih belum memaksimalkan pengelolaan dalam penggunaan sumber daya alam.
3. Efektivitas belanja langsung Kabupaten Kupang tahun 2016 sampai 2018 tiap tahunnya mengalami peningkatan dimana tahun 2016 yaitu sebesar

86,85% dalam kategori cukup efektif, tahun 2017 yaitu mengalami peningkatan sebesar 89,22% dalam kategori cukup efektif dan tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu sebesar 92,44% dalam kategori efektif. Penurunan dan kenaikan efektivitas anggaran belanja langsung dikarenakan beberapa program/kegiatan perencanaan di Kabupaten Kupang tidak terealisasi semuanya.

4. Efektivitas penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kupang tahun 2016 sebesar 99,85%, tahun 2017 sebesar 101,61%, dan tahun 2018 sebesar 99,79%. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 99,43% yang berarti efektivitas penerimaan pembiayaan daerah kabupaten kupang tergolong efektif tetapi kurang efisien. Pemerintah daerah kabupaten kupang telah mencapai target kinerjanya dengan baik walaupun masih terjadi penurunan tingkat persentase pada tahun 2016 dan 2018.
5. Efektivitas pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Kupang tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017 sebesar 100%, dan tahun 2018 tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah karena pada tahun 2018 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 23.376.131.933,34 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 23.376.131.933,34 artinya penerimaan pembiayaan hanya bisa menutup defisit anggaran belanja maupun pendapatan. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pengeluaran pembiayaan daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sebesar 66,66%. Ini menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan pengeluaran daerah Kabupaten kupang tahun 2016 sampai 2018 termasuk kurang efektif tetapi pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun

2016, 2017 dan 2018 sangat efisien karena pada tahun 2018 pemerintah daerah Kabupaten Kupang telah merealisasikan anggarannya secara baik.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka saran-saran yang di rekomendasikan atau disimpulkan penulis adalah :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan pendapatannya agar capaian realisasi pendapatan daerah dapat terus meningkat dan melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang sebaiknya meningkatkan dan mempertahankan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja daerah secara khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum. Dengan kinerja baik maka efisiensi dan efektivitas pendapatan dan belanja juga akan semakin baik dari tahun ke tahun.
3. Pemerintah daerah Kabupaten Kupang perlu meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja langsung ditahun-tahun selanjutnya, agar pencapaian kegiatan dan program ditahun selanjutnya sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang proses jalannya program kerja anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini dan Puranto, 2010. *Anggaran berbasis kinerja : penyusunan APBD secara komprehensif*. Yogyakarta:STIM YKPN.
- Basariyah, Siti. 2019. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa(BPMPD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako Palu.
- B. Grace dan P. Harry. 2019. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon”. *Jurnal Emba, Ekonomi Dan Bisnis*, vol 7 No.3, Hal 2979-2988. Juli 2019.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. UI-Pres. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*, BPFE: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai: manajemen keuangan daerah. Edisi Pertama*. UPP AMP YKPN.Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ks, Lazyra. 2016. “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mahsun, 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Mamesh, D, J.1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.

Permendagri.Nomor 13 tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Permendagri No. 25 tahun 2009 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.*

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Untari, Rusita. 2011. "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang". Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

*Undang-Undang No.17 Tahun 2003tentang keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999TentangPemerintah Daerah*

*Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.*